KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

SP–46/KLI/2023

Gangguan Layanan BSI Tidak Pengaruhi Layanan Penerimaan dan Pengeluaran Negara

Jakarta, 14 Mei 2023 – Sehubungan dengan informasi gangguan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diduga terkait dengan serangan *cyber* berupa *ransomware*, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan pemutusan sementara koneksi BSI ke Kementerian Keuangan sejak 8 Mei 2023. Kebijakan pemutusan tersebut merupakan langkah preventif sesuai dengan tata kelola yang berlaku dan harus dijalankan untuk menjaga keamanan sistem informasi Kementerian Keuangan. Adapun sistem informasi Kementerian Keuangan terhubung koneksi dengan BSI terkait layanan penerimaan dan pengeluaran negara antara lain melalui MPN, SIKP, SPRINT, SPAN, Lelang, dan e-SBN.

Selama periode pemutusan koneksi BSI ke Kemenkeu, telah dilakukan koordinasi dan implementasi kebijakan keberlangsungan layanan dengan BSI dan pihak terkait sebagai langkah mitigasi dalam merespon pernyataan kendala layanan dari BSI sesuai surat direksi BSI tanggal 9 dan 11 Mei 2023. *"Melalui upaya kordinasi tersebut dipastikan layanan APBN kepada penerima pembayaran dengan tujuan rekening BSI tetap dapat dilakukan melalui unit vertikal Kementerian Keuangan dengan aman dan akuntabel",* jelas Astera Primanto Bhakti, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu.

Selanjutnya berdasarkan penyampaian pernyataan keamanan operasional dan layanan telah berlaku normal pada sistem BSI sebagaimana Surat Direksi Bank Syariah Indonesia Nomor 03/770-3/DIR/RDP tanggal 11 Mei 2023, Dirjen Perbendaharan juga menyampaikan telah melakukan koordinasi intensif untuk pemulihan koneksi dengan BSI. Pemulihan koneksi Bank Syariah Indonesia dengan Kementerian Keuangan, sesuai kondisi operasional layanan yang sudah normal membutuhkan proses review dan monitoring serta evaluasi secara bertahap dan proporsional.

Pada saat ini tengah dilakukan koordinasi intensif untuk memastikan kondisi layanan normal pasca pemutusan sementara koneksi Bank Syariah Indonesia memenuhi standar keamanan sistem Kementerian Keuangan, diantaranya melalui pembaruan *password*, evaluasi keamanan *internet protocol* dan inventarisasi serta review atas potensi anomali data. *"Melalui proses yang sedang dilakukan, direncanakan mulai tanggal **15 Mei 2023** pemulihan koneksi layanan BSI dan Kemenkeu dapat secara efektif diimplementasikan untuk seluruh proses bisnis layanan penyaluran APBN pada unit vertikal Kementerian Keuangan",* tutup Dirjen Perbendaharaan.

***

Narahubung Media:

Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

134 Kemenkeu PRIME
081310004134
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Kemenkeuri | @kemenkeuRI | Kemenkeu RI